

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan  
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo



Syarif Mbuinga



Darwis Moridu

## Boalemo-Pohuwato WTP, Gorut?

Darem Buktikan Diri, Syarif PD ke Pilgub

**GORONTALO (RAGORO)** - Setelah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango.

Kabupaten Boalemo dan Pohuwato kembali meraih opini

► [Baca WTP](#)

### WTP...

■ Sambungan dari Hal 1

Unqualified Opinion alias Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Lalu bagaimana dengan Pemda Gorontalo Utara? sepertinya harus menunggu hingga Senin (8/5) nanti. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2019, untuk pemerintah daerah Boalemo dan Pohuwato sepertinya menjadi ajang pembuktian untuk kedua bupati dan jajarannya. Karena barulah di masa kepemimpinan Darwis Moridu-Anas Jusuf, Kabupaten Boalemo berhasil meraih WTP tiga kali berturut-turut. Tentunya ini menjadi jawaban, atas segala kritikan dan ke-sangsian atas kinerja Pemda Boalemo dibawah kepemimpinan Darwis

Moridu dan Anas Jusuf. Demikian pula dengan Kabupaten Pohuwato, 7 kali WTP diraih Syarif Mbuinga dua periode sebagai bupati Pohuwato.

Hal ini yang diungkapkan Syarif ketika diberi kesempatan menyampaikan sambutannya. "terimah kasih kepada BPK RI, BPKP, dan jajarannya, sudah 3 bulan saya tidak datang ke Kota Gorontalo, 3 bulan saya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan memakai Jas seperti ini, tapi karena undangan BPK RI saya datang. BPK RI telah menyatuhkan semua, maklum pak kami di kampung, disituasi memutus mata rantai Covid-19, kami harus patuh, berdiam diri, tidak kemana-mana. InsyaAllah ini akan segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas normal," ujar Syarif Mbuinga. Syarif mengatakan, ini merupakan

WTP yang ke-7 kali. Iapun sepakat apa yang disampaikan Ketua DPRD Boalemo, kalau WTP ini bukan karya satu dua orang, tapi merupakan karya bersama, mulai dari bupati, wakil bupati, sekda inspektorat dinas dan seluruh tenaga honor dan abdi. "lagi pula saya tinggal 8 bulan menjabat sebagai bupati, semoga ke depan ini bisa dipertahankan, dan ditingkatkan," ujar Syarif Mbuinga. Sementara itu Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE dalam sambutannya memberikan apresiasi usaha dan perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Boalemo dan Pohuwato. BPK RI akan terus mendorong agar seluruh Pemda terus melakukan perbaikan secara sistemik dan konsisten. "pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019, sudah sesuai dengan UU No 15 2004.

UU No 15-2006. Ini merupakan tahun ke lima bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik system akuntansi maupun penyajian laporan keuangan," tutur Rahmadi. Ini merupakan tahun ke lima pemerintah pusat dan pemda se Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik system akuntansi maupun penyajian laporan keuangan. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah lebih komprehensif menyajikan seluruh hak dan kewajiban yang reflesikan ke dalam tujuh laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan laporan keuangan. (riel/RG)